



Judul : Sawah rusak karena bencana, komisi IV: petani masih sulit bangkit
Tanggal : Sabtu, 17 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sawah Rusak Karena Bencana Komisi IV: Petani Masih Sulit Bangkit

ANGGOTA Komisi IV DPR Usman Husin mendukung kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) merehabilitasi sawah rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk program itu disiapkan anggaran Rp5 triliun.

Usman bilang, rehabilitasi sawah pascabencana merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup petani yang kehilangan sumber penghasilan utama. "Sawah yang rusak membuat petani kehilangan mata pencaharian, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan," ujarnya.

Diketahui, Mentan Andi Amran Sulaiman akan merehabilitasi 98 ribu hektare sawah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbaw dengan alokasi anggaran Rp 5 triliun. Program tersebut bertujuan memulihkan produksi pangan sekaligus pendapatan petani.

"Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional," kata Amran saat meninjau rehabilitasi sawah di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Kamis (15/1/2026).

Usman menambahkan, bencana banjir dan longsor tidak hanya merusak lahan pertanian, tetapi juga menghancurkan hasil panen, benih, serta sarana produksi pertanian lainnya. Akibatnya, petani mengalami kerugian berlipis dan berada dalam kondisi ekonomi yang sangat rentan. "Petani kehilangan panen, kehilangan modal, dan kehilangan waktu tanam," ucapnya.

Tanpa bantuan negara, lanjut Usman, petani akan kesulitan

bangkit karena biaya perbaikan sawah, pembelian bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya tidak kecil. Karena itu, bantuan kudu benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. "Negara harus memastikan bantuan ini tidak berhenti di level administrasi," tegasnya.

Menurut Usman, rehabilitasi sawah merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan. Petani kerap menjadi pihak paling terdampak bencana, namun paling lambat menerima pemulihan. "Bantuan ini bukan sekadar soal pertanian, tetapi juga soal keadilan sosial," ujarnya.

Ia juga mendorong pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam proses pendataan serta pelaksanaan rehabilitasi agar program berbasis kebutuhan riil di lapangan dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Senada, anggota Komisi IV DPR Teuku Abdul Khalid mendesak Kementan memberikan perhatian serius terhadap rehabilitasi sawah di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi. Alokasi anggaran saat ini dinilai belum memadai untuk menangani kerusakan lahan pertanian yang tergolong parah. "Kerusakan tidak hanya terjadi pada sawah, tetapi juga infrastruktur pendukung," tandasnya.

Di sejumlah wilayah, lanjutnya, endapan lumpur bahkan mencapai ketinggian yang mengkhawatirkan dan menutupi badan jalan. Karena itu, Pemerintah diminta mengkaji kemungkinan pemanfaatan lumpur tersebut untuk kegiatan pertanian jika secara teknis memungkinkan. ■ TIF